Laporan Awal Hasil Eksaminasi Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel¹

I. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan hasil eksaminasi dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Adapun perkara yang diputuskan adalah berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh oleh Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TUK Indonesia), selaku Penggugat I, Ahmad, S.H. (Penggugat II), Herni Ramdlaningrum, (Penggugat III), dan Harvina Nurul Fatimah (Penggugat IV) terhadap Bank Mandiri (Tergugat) beserta PT Astra Agro Lestari, Tbk, (Turut Tergugat I) atau AAL dan PT Agro Nusa Abadi (Turut Tergugat II) atau ANA.

Pokok permasalahan yang mendasari gugatan ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan PMH dengan memberikan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II yang mana kegiatan yang dijalankan oleh Turut Tergugat II diduga bersifat ilegal karena ketiadaan Hak Guna Usaha (HGU) atas perkebunan yang dikelola. Selain itu, oleh karena kegiatan yang bersangkutan, terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Gugatan ini diajukan sebagai upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban lembaga keuangan seperti bank sebagai entitas pembiayaan yang seharusnya mempunyai kepatuhan dalam penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keuangan berkelanjutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam putusannya pada 10 Juli 2025 tidaklah memutuskan pokok perkara. Putusan mereka meng-NO-kan gugatan para penggugat alias gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard - NO*). Putusan ini secara khususnya didasarkan pada dikabulkannya eksepsi formal yang diajukan oleh pihak lawan yaitu eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hasil eksaminasi ini bertujuan untuk mengkritisi putusan majelis hakim, mengidentifikasi kelemahan dan peluang bagi menyusun argumentasi kuat dalam proses persidangan bagi para penggugat.

¹ Disusun oleh Muhammad Faiz Aziz (STH Indonesia Jentera) dan dibantu oleh Cikal Restu Syiffawidiyana (STH Indonesia Jentera).

II. Analisis terkait dengan Kurang Pihak *plurium litis consortium*

Dalam putusan No. 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, hakim mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 5, yaitu gugatan Para Penggugat dianggap Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Pertimbangan hakim adalah karena:

- a. Para Penggugat tidak menyertakan beberapa pihak yang hakim anggap memiliki keterkaitan/relevansi dalam kegiatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Para pihak tersebut diantaranya:
 1. Penggugat tidak menarik Eco Nusantara sebagai salah pihak, padahal laporan Eko Nusantara menjadi dasar keyakinan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat II menjalankan usaha secara ilegal.
 2. Penggugat tidak menarik Kementerian ATR/BPN sebagai pihak padahal Kementerian ATR/BPN adalah pihak yang dapat memberikan pernyataan dan penjelasan secara resmi mengenai legal standing di bidang pertanahan.
 3. Penggugat tidak menarik Kementerian LH sebagai pihak padahal Kementerian LH adalah pihak yang dapat memberikan penjelasan dan pernyataan secara legal mengenai permasalahan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat.
- b. Hakim memperkuat alasannya dengan memberikan legitimasi preseden:
 1. Yurisprudensi MA RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976: *“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*.
 2. Yurisprudensi MA RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, *“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”*.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak menyertakan penjelasan yang lebih detail mengenai posisi para pihak yang dianggap memiliki relevansi dalam kegiatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Apakah menjadi Pihak Penggugat, Pihak Turut Tergugat, atau justru hanya melibatkan pihak tersebut sebagai ahli atau saksi.

Dalam implementasi putusan, sebuah putusan dapat dianggap NO jika dianggap kurang pihak. Namun, terdapat beberapa yurisprudensi yang bisa

membantahnya, Pertama Yurisprudensi Putusan MA No. 2490 K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa,

“Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;”

Putusan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA lainnya yang masuk dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pihak dalam warisan, diantaranya: Putusan MA No. 244 K/Sip/1959, Putusan MA No. 439 K/Sip/1969, dan Putusan MA No. 516 K/Sip/1973. Dari Yurisprudensi tersebut, jika satu pihak telah dianggap mewakili kepentingan pihak lain, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kurang pihak. Begitu pula dalam kasus *a quo*. Pihak yang tidak ditarik dalam gugatan dianggap tidak termasuk kategori *litis consortia necessaria*/kurang pihak karena kepentingannya sudah terwakili. Dengan demikian, ketidakhadiran “pihak yang tidak ditarik” tersebut, tidak membuat gugatan menjadi cacat formil.

Kedua, kaidah yurisprudensi No. 305 K/Sip/1971, dimana penggugat berhak atau mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya penggugat yang berwenang dalam menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di pengadilan. Dengan kewenangan tersebut, penggugat dapat menyesuaikan gugatan dengan fakta dan bukti yang dimiliki, sehingga proses berikutnya diharapkan berlangsung efektif dan efisien. Yurisprudensi ini juga sebetulnya membantu penggugat dalam hal menghindari intervensi pihak lain yang tidak berkepentingan, sehingga menjamin kepastian hukum ke depan.

Ketiga, kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 yang serupa dengan kaidah di atas bahwa gugatan yang diajukan haruslah berdasarkan sengketa hukum yang jelas antara para pihak yang bersangkutan. Karenanya, ini menjadi kewenangan penggugat lagi untuk menentukan secara tepat siapa yang harus digugatnya.

Keempat, yurisprudensi Putusan MA No. 820/Pdt.G/1988/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989. Putusan ini menjadi cikal bakal mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 92 UU 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan tersebut menggeser doktrin hukum keperdataan konvensional yang mendalilkan “*tiada gugatan tanpa kepentingan hukum.*” Sehubungan dengan itu, konsep *legal standing* mengenai organisasi lingkungan sebagai pihak yang memiliki hak gugat disampaikan juga sejalan dengan pemikiran ahli seperti Christopher D. Stone dalam bukunya *Should Trees Have Standing: Toward Legal Rights of Natural Objects?*. Stone berpendapat bahwa organisasi lingkungan—berdasarkan data/alasan—menduga jika suatu kegiatan akan merusak lingkungan, maka organisasi lingkungan tersebut dapat bertindak sebagai wali dari objek alam.

Sehubungan dengan itu, perlu dikaji apakah implementasi Yurisprudensi tersebut dapat diimplementasikan dalam kasus *a quo*. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan:

- a. Hakim menganggap bahwa Eco Nusantara perlu ditarik menjadi pihak dalam kasus *a quo* sebab laporan Eko Nusantara menjadi dasar keyakinan Para Penggugat bahwa Turut Tergugat II menjalankan usaha secara ilegal. Hakim menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya bahwa Eco Nusantara adalah organisasi independen. Sebagai informasi, berdasarkan profil Eco Nusantara yang dilihat pada website econusantara.org, Eco Nusantara adalah organisasi independen yang digerakkan oleh misi yang didedikasikan untuk melindungi hutan, iklim, dan masyarakat. Jika menarik kesamaan peran dan tujuan organisasi, Eco Nusantara memiliki maksud dan tujuan organisasi yang mirip dengan maksud dan tujuan Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK Indonesia) sebagai Penggugat I. Laporan yang diterbitkan Eco Nusantara sebetulnya dapat menjadi alat bukti yang bisa mendukung dalil-dalil penggugat tanpa harus diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam gugatan ini. Mereka bukanlah pihak yang merugikan dan dirugikan. Argumen Majelis Hakim tentu keliru. Apabila hal ini dituruti, maka hal ini bisa menciptakan logika bahwa setiap penerbit laporan yang mungkin bisa ditarik sebagai saksi atau ahli harus menjadi pihak dalam perkara, yang tentu saja tidak rasional. Dengan demikian, kepentingan Eco Nusantara seharusnya sudah terwakili oleh TUK Indonesia dan tidak perlu ditarik sebagai pihak.
- b. Hakim menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) perlu ditarik menjadi pihak dalam kasus *a quo* sebab

perlu memberikan pernyataan dan penjelasan secara resmi mengenai *legal standing* di bidang pertanahan dan permasalahan sosial dan lingkungan. Apakah memungkinkan jika menarik Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LH sebagai saksi? mengingat bahwa hakim menyatakan yang diperlukan dari dua kementerian tersebut adalah pernyataan dan penjelasan mengenai legal standing di bidang pertanahan dan permasalahan sosial dan lingkungan PT. Agro Nusa Abadi selaku Turut Tergugat II. Karena, jika menyertakan kedua Kementerian tersebut sebagai Turut Tergugat, apakah PN Jakarta Selatan memiliki kewenangan mengadili legal standing dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LH? Atau gugatan ini justru masuk dalam kewenangan Pengadilan TUN? Dasar pertimbangan hakim tentu saja keliru. Gugatan ini adalah PMH perdata dalam lingkup privat. Tidak ada isu soal perizinan berusaha yang digugat termasuk soal keabsahan status lahan. Pokok isu yang digugat adalah karena perbuatan tergugat dan turut tergugat karena ketiadaan HGU yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi. Menarik mereka dalam gugatan ini akan semakin mengaburkan substansi perkara menjadi sengketa yang tidak jelas yang mencampuradukkan sengketa perdata dan tata usaha negara. Karenanya, kehadiran mereka tidaklah relevan dalam perkara ini sebagai pihak, walaupun data dan keterangan mereka bisa relevan sebagai bukti.

- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain para pihak di atas, majelis hakim pun hendak menarik OJK sebagai pihak. Pertimbangan dalam penarikan ini menunjukkan argumentasi majelis hakim yang keliru. Serupa dengan penarikan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LH, OJK hanyalah regulator dan bukan pihak yang merugikan dan dirugikan. Tidak ada sengketa antara penggugat dengan OJK. Karenanya OJK tidak punya hubungan kausal langsung dengan kerugian penggugat.

Dengan menguji yurisprudensi lain yang dapat membantah soal *Plurium Litis Consortium*, maka kurangnya pihak ini menjadi tidak relevan. Hanya penggugatlah yang punya hak dan kewenangan dalam menentukan siapa yang digugatnya.

III. Melihat Kembali Aspek Substantif Perkara

Dalam perkara ini, terdapat dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari rangkaian hubungan hukum antara Bank Mandiri (Tergugat), Astra Agro Lestari atau AAL (Turut Tergugat I), dan Agro Nusa Abadi atau ANA (Turut Tergugat II).

Bank Mandiri merupakan pemberi kredit, AAL sebagai penerima kredit, dan ANA diduga penerima manfaat kredit. Dalam bagian ini, dalil-dalil substantif perkata hendak dilihat dari aspek relasi hukum antar para pihak.

III.1. Bank Mandiri dan AAL

Hubungan antara Bank Mandiri dan AAL yang berlandaskan perjanjian kredit memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur oleh beberapa ketentuan penting yaitu sebagai berikut ini.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara). Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian kredit merupakan kontrak yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas menentukan isi dan syarat perjanjian sesuai kehendak mereka. Dalam praktiknya, negosiasi mutual ini biasanya dapat diterapkan dengan melihat jumlah nominal kredit dan pihak yang akan memanfaatkan fasilitas . Berbeda dengan nasabah biasa yang hampir pasti menggunakan standar klausula baku dalam perjanjian kredit.
2. Keberlakuan perjanjian kredit (Pasal 1340 KUHPerdara). Pada prinsipnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga kewajiban dan hak dalam perjanjian terkait terbatas pada para pihak yang membuatnya, kecuali jika perjanjian tersebut digunakan untuk pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Dalam perjanjian kredit, perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga tidak dapat dilakukan **kecuali jika dapat dibuktikan bagaimana substansi dari perjanjian kredit tersebut.**
3. Kewajiban Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit (UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998 atau UU Perbankan jo. UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK)
 - Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pelaksanaan usaha yang mencakup analisis yang mendalam dan penilaian kemampuan, itikad, dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan kredit (Pasal 2, 8, 20A, 29 UU Perbankan jo. UU P2SK).

- Prinsip ini menjamin bahwa bank melakukan penilaian menyeluruh agar risiko kredit macet dapat diminimalkan dan kegiatan pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- **Dalam memberikan kredit kepada perusahaan, Bank wajib memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Bank juga harus memiliki serta menerapkan sistem pengawasan internal untuk menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, maka setiap Bank perlu senantiasa menjaga kesehatan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat (**Penjelasan Pasal 20A ayat (1) huruf b UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK**).
- Kewajiban ini juga secara tidak langsung mendorong bank untuk melakukan due diligence termasuk penilaian terhadap legalitas dan penggunaan dana yang akan diberikan dalam bentuk kredit.

Oleh karena dugaan PMH yang saat ini digugat, penting untuk memperhatikan unsur yang perlu dibuktikan terhadap Bank Mandiri dalam kaitannya dengan AAL ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) secara menyeluruh.
Perlu untuk membuktikan bahwa Bank Mandiri tidak melakukan penilaian risiko yang cukup terhadap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dari kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada AAL. Bank dapat dinilai lalai jika tidak memastikan dana kredit tidak digunakan untuk aktivitas ilegal atau merugikan, terutama terkait dengan kegiatan anak perusahaan AAL seperti ANA.
2. Kegagalan dalam menerapkan due diligence yang memadai.
Perlu untuk membuktikan bahwa bank tidak melakukan pemeriksaan yang detail, mendalam dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk berkaitan dengan Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) (POJK No. 8/2023, dahulu POJK No.

12/2017), pedoman internal, dan/atau standar lain relevan yang berlaku, misalnya standar ISO 14001, jika mereka memilikinya.

3. Relasi antara kredit dan kerugian yang terjadi

Perlu ada pembuktian kaitan faktual bahwa dana yang diberikan bank memang digunakan dan disalurkan untuk aktivitas yang merugikan lingkungan, sosial, atau melanggar hukum, misalnya melalui ANA. Pembuktian ini dilakukan terhadap isi perjanjian kredit dan fakta yang terjadi dilapangan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas terdapat juga ketentuan pada level POJK yang uraiannya dijelaskan dalam bagian III.3 di bawah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum.

Secara umum, dalam hukum acara perdata, beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat. Terdapat asas "**siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan**" (*cesso probandi incumbit ei qui dicit*). Hal ini berarti bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil atau klaim dalam proses sengketa wajib untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga kebenaran formil dapat dipenuhi sesuai fakta yang terbukti secara rasional dan logis. Dalam konteks perkara perdata, hakim bersifat pasif, artinya hakim menilai dan memutus berdasarkan bahan bukti yang diajukan, tanpa harus secara aktif mencari bukti sendiri.

Sementara itu, dalam perkara sengketa konsumen, hukum mengenal konsep pembuktian terbalik, yaitu pihak tergugat atau pemilik kegiatan harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau aktivitas yang merugikan konsumen. Namun, dalam kasus hubungan perdata seperti antara Bank Mandiri dengan AAL yang lebih banyak bersifat kontraktual dan *tort*, penerapan pembuktian terbalik **sulit dilakukan**. Hal ini karena dalam hubungan perdata yang mendasarkan pada perjanjian kredit, beban pembuktian tetap berada pada pihak yang mengklaim adanya kelalaian atau kerugian, yaitu pihak penggugat. Dengan kata lain, Bank Mandiri dalam konteks sengketa *due diligence* terkait kredit tidak memiliki beban membuktikan ketidakbersalahannya,

III.2. Astra Agro Lestari dan Agro Nusa Abadi

Secara kontraktual, hubungan pemberian kredit oleh Bank Mandiri kepada AAL hanya terikat antara kedua belah pihak. Namun, kaitan hukum antara Bank Mandiri dengan ANA (anak perusahaan AAL) dapat mungkin terjadi jika terjadi karena adanya klausul perjanjian kredit antara AAL dan Bank Mandiri yang mengindikasikan bahwa ada dana kredit yang disalurkan untuk kepentingan perkebunan atau kepentingan ANA. Namun demikian, perlu pembuktian adanya klausul demikian dan mengacu pada asas **"siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan"** (*cesso probandi incumbit ei qui dicit*), maka beban pembuktian ada pada penggugat. Tentu hal ini sangat menantang mengingat perjanjian kredit pada umumnya bersifat privat dan *confidential*.

Cara yang penting dalam membuktikan relasi antara AAL dan ANA dengan melihat bagaimana kedudukan mereka berdua dalam struktur grup perusahaan. AAL merupakan *parent company* dari ANA. AAL, sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, mempunyai kepemilikan saham atas ANA sebesar 99%. ANA sendiri merupakan perusahaan tertutup. Dengan berkaca pada situasi sederhana berdasarkan persentase kepemilikan tersebut, jelas sudah bahwa AAL mempunyai tingkat potensi intervensi yang tinggi terhadap anak perusahaannya tersebut. Karenanya, potensi keterlibatan dalam ikut campur urusan manajemen dan tata kelola ANA serta bisnis ANA cukup tinggi walaupun keduanya adalah dua entitas perseroan terbatas yang terpisah.

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat juga tepat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menuntut pertanggungjawaban Turut Tergugat I (induk perusahaan) terhadap PMH yang dilakukan oleh Turut Tergugat II (anak perusahaan). Dalil ini membantah argumen pertahanan yang berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas dan entitas hukum yang terpisah (*separate legal entities*). Argumen pertahanan yang menuntut adanya putusan *inkracht* terlebih dahulu adalah tidak relevan. Doktrin *piercing the corporate veil* justru diterapkan ketika badan hukum disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam konteks ini, kendali Turut Tergugat I yang memiliki 99% saham atas Turut Tergugat II menunjukkan adanya kesatuan ekonomi (*single economic entity*) yang memungkinkan induk perusahaan mengendalikan tindakan anak perusahaannya. Dengan demikian, Turut Tergugat I tidak bisa lepas tangan dari PMH yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.

Doktrin *piercing the corporate veil* hanya berlaku pada situasi-situasi tertentu.

Pengabaian batas pertanggungjawaban korporasi antara induk dan anak perusahaan dapat terjadi dengan memperhatikan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:

(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.*

Namun yang menjadi catatan, hubungan antara AAL sebagai Induk Perusahaan dan ANA sebagai anak perusahaan harus tidak benar-benar terpisah secara manajemen atau keuangannya. Hal ini diperlukan pembuktian yang mendetail.

III.3. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam beberapa tren perkembangan hukum di Dunia, kasus serupa juga terjadi di beberapa negara lain, misalnya:

1. Tiga lembaga lingkungan—Friends of the Earth, Oxfam France, dan Notre Affaire à Tous—menggugat BNP Paribas atas besarnya pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan fosil, menuding bank melanggar kewajiban “duty of vigilance” di Prancis.
2. NGO lingkungan Belanda Milieudefensie menggugat bank ING, menuntut bank agar menghentikan pembiayaan sektor minyak & gas. Gugatan ini didasarkan pada “duty of care” di bawah hukum Belanda dan hak asasi lingkungan. Namun, dua kasus diatas juga masih berlangsung dan belum

memiliki

kekuatan hukum mengikat di negara-negara bersangkutan, dan belum bisa menjadi benchmark untuk kasus *a quo*. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan peradilan serta integritas di negara lain tentu mungkin akan memberikan konteks dan warna yang agak berbeda.

Hal menariknya adalah, kedua kasus tersebut menggunakan OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018) sebagai *soft law* yang dapat dijadikan acuan untuk ditarik dalam gugatan. Untuk membuktikan kelalaian bank mandiri dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Kebijakan *due diligence*. Bank Mandiri sebagai pihak tergugat dapat dianggap lalai (baik secara *negligent implementation* maupun *structural negligence* jika tidak melakukan *due diligence* sesuai prosedur dan standar yang telah diatur. Apalagi, mengingat bahwa Induk perusahaan yang diberikan kredit orang bank memiliki lebih dari 90% saham pada anak perusahaan.
- b. Perlu dicaritahu lebih lanjut apakah bank melakukan *environmental risk assessment* sebelum melakukan pencairan kredit. Jika tidak, maka tentu saja hal ini akan melanggar prinsip kehati-hatian UU Perbankan.
- c. Dalam melakukan pemberian kredit kepada korporasi yang memiliki tanggung jawab lingkungan, apakah bank melakukan *continuous monitoring* dan memiliki mekanisme *grievance* bagi korban? Hal ini dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam gugatan dan bisa menjadikan bank sebagai pihak yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan karena bank juga memiliki tanggung jawab sosial.

Jika melihat pada penjabaran PMH dalam Gugatan, Para penggugat sudah cukup menjelaskan dengan baik aturan hukum yang dilanggar, konsep hukum, termasuk penjelasan setiap unsur PMH. Namun, yang menjadi agak sulit dibuktikan adalah unsur melawan hukum dan unsur kausalitas. Regulasi mengenai korporasi yang cenderung kompleks dan dinamis bisa dimanfaatkan oleh para Tergugat untuk mencari argumentasi tandingan. Misalnya, yang paling jelas terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Meskipun ada pengecualian terhadap pasal tersebut, akan sulit mencari pembuktian mengenai pengelolaan manajemen dan keuangan pada PT. AAL dan ANA. Hal ini juga akan memperberat pembuktian pada unsur kausalitas.

Namun, berkaca pada perkembangan hukum yang ada, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijadikan landasan hukum untuk melegitimasi unsur melawan hukum dan unsur kausalitas dalam PMH. Pasal 2 ayat (2) dalam POJK tersebut yang mengharuskan adanya implementasi prinsip investasi yang bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan dan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mewajibkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip-prinsip yang lahir dari beberapa regulasi tersebut, bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan karena **melanggar asas pengharapan yang wajar dan turut serta (*aiding and abetting*) dalam kegiatan merusak lingkungan.**

Untuk mengklaim pelanggaran asas tersebut, Penggugat perlu membuktikan bahwa Bank Mandiri telah berkomitmen (secara regulasi internal dan praktik) untuk mengimplementasikan POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Jika benar, “pengharapan yang wajar” dari nasabah kepada Bank untuk tidak memberikan kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan pengrusakan lingkungan dan keuangan berkelanjutan, menjadi relevan.

Selain itu, jika komitmen Bank Mandiri terhadap POJK tersebut terbukti, maka Bank Mandiri juga dapat dianggap lalai dan melanggar Pasal 11 POJK 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi:

“Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. potensi pertumbuhan usaha;*
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;*
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;*
- d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan*
- e. upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.”*

POJK 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ini cukup menarik karena lumayan bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 11 tersebut khususnya huruf e, disebutkan bahwa memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bank juga memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup).

Lebih lanjut, dalam lampiran peraturan yang sama terdapat ukuran dalam menentukan prospek usaha berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Prospek Usaha Debitur dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Prospek Usaha	Komponen Penilaian
Lancar	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Perhatian Khusus	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kurang Lancar	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum, dengan penyimpangan yang cukup material.
Diragukan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum, dengan penyimpangan yang material.
Macet	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum, serta memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Jika perusakan lingkungan dan konflik sosial yang disebabkan oleh Tergugat I dan II, serta kegiatan ilegal tanpa HGU Tergugat II terbukti, maka Bank Mandiri

dapat pula terbukti melanggar asas kehati-hatian yang dapat memberikan kerugian pada nasabah bank dan masyarakat luas karena terlibat dalam mendukung perusahaan perusak lingkungan. Dengan begitu, Bank merusak reputasi dan kepercayaan publik yang merupakan dasar kegiatan perbankan dan UU Perbankan (*Vide* Pasal 2 UU Perbankan).

Mereka pun bisa diklaim atau digugat karena kegagalan dalam menerapkan due diligence yang memadai. Namun demikian, perlu untuk membuktikan bahwa bank tidak melakukan pemeriksaan yang detail, mendalam dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk berkaitan dengan

Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD) (POJK No. 8/2023, dahulu POJK No. 12/2017), pedoman internal, dan/atau standar lain relevan yang berlaku.

IV. Kesimpulan, Peluang, dan Rekomendasi

IV.1. Kesimpulan

1. Putusan PN Jaksel bersifat NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena hakim mengabulkan eksepsi *kurang pihak* (plurium litis consortium). Hakim berpendapat bahwa gugatan harus menyertakan Eco Nusantara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan OJK. Terhadap putusan tersebut, pertimbangan hakim lemah karena berikut ini:
 - a. Eco Nusantara hanyalah lembaga independen penerbit laporan, bukan pihak yang merugikan maupun dirugikan, sehingga cukup diposisikan sebagai alat bukti atau saksi ahli.
 - b. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan sengketa perdata ini. Penarikan mereka justru mengaburkan pokok perkara menjadi sengketa TUN.
 - c. OJK sebagai regulator bukan pihak yang memiliki *legal interest* dalam perkara privat ini.
2. Yurisprudensi relevan (MA No. 2490 K/Pdt/2015; MA No. 305 K/Sip/1971; MA No. 294 K/Sip/1971; dan putusan-putusan lama seperti 244 K/Sip/1959) menegaskan bahwa:
 - a. Tidak semua pihak harus ditarik dalam gugatan.
 - b. Penggugat memiliki diskresi penuh untuk menentukan siapa yang digugatnya.
 - c. Gugatan tidak dapat dikategorikan “kurang pihak” jika kepentingan pihak lain sudah terwakili.
 - d. Penggugat sebagai organisasi lingkungan memiliki hak gugat untuk bertindak sebagai wali dari objek alam.
3. Dari sisi substansi PMH, para penggugat telah menunjukkan rangkaian hubungan hukum yang bisa menimbulkan tanggung jawab hukum:
 - a. Bank Mandiri diduga lalai menerapkan prinsip kehati-hatian dan *due diligence* kredit (UU Perbankan jo. POJK Keuangan Berkelanjutan).
 - b. AAL sebagai induk diduga berperan mengalirkan dana ke ANA,

sehingga relevan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*.

- c. ANA melakukan usaha tanpa HGU yang menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial (UU Perkebunan, UU PPLH).

IV.2 Peluang dan Rekomendasi

Peluang yang berpotensi dimanfaatkan dalam proses banding yaitu berikut ini:

1. Melemahkan dasar NO, dengan merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui diskresi penggugat dalam menentukan pihak yang digugat, serta membuktikan bahwa pihak yang tidak ditarik tidak termasuk *litis consortia necessaria*.
2. Menguatkan legal standing. TUK Indonesia sebagai organisasi memiliki legitimasi untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat (dengan mencantumkan Pasal 91 atau 92 UU PPLH dalam surat gugatannya).
3. Perkuat landasan hukum PMH. Bank Mandiri melanggar Pasal 2, 8, dan 29 UU Perbankan (prinsip kehati-hatian). Bank juga berpotensi melanggar POJK 51/2017 dan POJK 40/2019. Perlu melihat bukti Proper berkaitan posisi Bank Mandiri.
4. Bangun narasi kausalitas dan relasi antara Bank Mandiri → AAL → ANA → kerugian masyarakat. Hal ini memperkuat unsur kausalitas dalam PMH (Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara).
5. Dorong argumentasi progresif bahwa putusan PN Jaksel berpotensi menghalangi akses keadilan lingkungan jika alasan *kurang pihak* digunakan secara kaku.